

MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PENANANGANAN BENCANA ALAM DI KAMPUNG LEBO KECAMATAN MANGANITU (Studi di Kantor BPBD Kabupaten Sangihe)

Meilany Treisy Saverini Gaghana¹

Ronny Gosal²

Donald Monintja³

Abstrak

Manajemen pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yakni proses dan hasil. Dari prosesnya pengertian manajemen pemerintahan harus lebih mengutamakan proses yang demokratis yang berlandaskan pada rencana dan tujuan yang ditetapkan. Dari hasilnya maka manajemen pemerintahan akan menggambarkan kesungguhan hati, pemakaian sumber daya terbatas secara hati-hati serta mengutamakan administrasi yang baik di atas proses yang ada, maka manajemen pemerintahan yang baik tercermin dari proses pengambilan keputusan yang demokratis. Penelitian ini difokuskan pada fungsi-fungsi manajemen. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan wawancara terhadap informan kunci dalam instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa manajemen pemerintahan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek : perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

Kata Kunci : Manajemen Pemerintahan, Fungsi-Fungsi Manajemen

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Bencana Alam merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun nonmateri. Bencana tersebut bisa dicontohkan seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi adapula bencana non alam seperti kebakaran gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar kelompok dan teror. Bencana merupakan sebuah fenomena kehidupan manusia yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya. Manusia hanya mampu mengenali gejala-gejala awal dan memprediksi terjadinya. Kecanggihan teknologi yang diciptakan manusia terkadang hanya mampu menjelaskan gejala awal ini, sehingga kejadian detil dari bencana itu hanya dalam prediksi manusia. Meskipun demikian, dengan kemampuan mengenali gejala-gejala awal dari sebuah bencana manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Persiapan itu meliputi persiapan sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi bencana, dan pasca terjadinya bencana. Artinya, kesiapan yang dapat dilakukan ketika mengenali gejala awal, tingkat resikonya dan lain sebagainya. Salah satu potensi bencana yang diketahui masyarakat secara luas yaitu bencana banjir dan tanah longsor, bencana alam ini sempat menarik perhatian dunia karena bukan hanya menyebabkan kerugian material yang ditimbulkan tetapi juga korban jiwa ketika bencana itu terjadi.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di kampung Lebo, kecamatan Mangani, kabupaten

Kepulauan Sangihe telah menelan korban jiwa, 3 orang meninggal, 8 orang dirawat di puskesmas, 18 rumah rusak berat, 8 rumah rusak sedang, 7 rumah rusak ringan serta kerusakan infrastruktur yang ada seperti satu jembatan rusak, talud penahan jalan kira-kira 18m ambruk, jaringan air bersih rusak, ruang gedung Sekolah Dasar YPK Bethani Lebo satu buah hilang, dan gedung gereja GBI Yerusalem Baru satu buah hilang. Karena belum baiknya manajemen akan mengakibatkan kurang fokus dan tidak teroptimalnya pekerjaan pada bidang ini. Fokus manajemen yang perlu dilakukan yaitu :

Perencanaan (planning), untuk mencapai suatu tujuan pelaksanaan maka diperlukan penyusunan prosedur dan standarisasi penanganan bencana. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BPBD sudah dilaksanakan, tetapi untuk pencegahan dan pengurangan resiko masih teramat minim. Proses penanggulangan bencana mestinya dilakukan dengan pengurangan resiko bencana artinya dengan aksi kerja nyata namun lambat laun pembuatan tanggul permanen, pengerukan sungai dan pembuatan aliran air dengan tujuan mengurangi resiko banjir. Lemahnya Pengorganisasian (organizing), antar lembaga-lembaga pemerintah daerah kabupaten kepulauan Sangihe baik yang terkait langsung dan yang tidak terkait langsung. Menjadi ganjalan dalam peluasan pembangunan koordinasi yang dilakukan sampai saat ini masih hanya sekedar memfasilitasi belum pada pengintegrasian program kerja. Pelaksanaan (actuating), dalam hal ini pemerintah juga masih kurang

memberikan perlindungan kehidupan sosial dan rasa aman yang diakibatkan oleh suatu peristiwa bencana banjir. Hal ini terlihat dari besarnya kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa banjir, kerusakan dan kerugian tersebut akan berakibat pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang harus memperbaiki kerusakan secara mandiri. Dampak lainnya terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat karena kerusakan juga terjadi pada lahan pertanian, dan fasilitas pelayanan publik seperti sarana dan prasarana kelautan, pasar dan pusat perdagangan lainnya yang akan menyebabkan kurangnya penghasilan masyarakat yang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Pengawasan (controlling), yang dilakukan dalam hal pemenuhan bantuan kepada korban yang terdampak bencana hal tersebut memang sering terjadi pada korban bencana apalagi dalam masa tanggap darurat disebabkan karena kurangnya pendanaan. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan air bersih, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan dan tempat hunian. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mencukupi semua kebutuhan dasar para korban bencana secara adil dan merata, melihat para korban bencana alam sulit mendapatkan sumber penghasilan saat bencana terjadi. Di hal lainnya belum ada desa siaga bencana di kabupaten kepulauan sangihe yang dapat mengurangi resiko bencana banjir dan tanah longsor. Disisi lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah

kabupaten kepulauan Sangihe masih kurang mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap penanggulangan bencana yang berpotensi memiliki resiko bencana. Untuk itu perlu upaya sistematis yang dapat meminimalisir resiko bencana atau potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana berupa jatuhnya korban jiwa dan rusaknya aset serta harta benda akibat bencana alam. Adapun upaya-upaya tersebut berupa mitigasi bencana (pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan) ataupun upaya mengurangi kerentangan (fisik, material, sosial, kelembagaan, perilaku / sikap). Melihat luasnya kegiatan penanganan bencana maka masyarakat bersama pemerintah perlu mengambil peran tertentu yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kemampuan masing-masing.

Tinjauan Pustaka

George R. Terry dalam buku Principles of management (Sukarna, 2011 : 3), juga menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predeternined obojectives through the efforts of otherpeople*. Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Fungsi Manajemen, George R. Terry, 1958 dalam bukunya principles of management (Sukarna, 2011 : 10) membagi 4 dasar fungsi manajemen, yaitu :

1. Perencanaan
yaitu memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian

Ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3. Pelaksanaan

Membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

4. Pengawasan

Dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses

penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. (JOHN W. CRESWELL, 2016). Adapun Informan Penelitian terdiri dari :

1. Kepala BPBD Sangihe
2. Sekretaris BPBD
3. Relawan
4. Masyarakat Korban Bencana

Hasil Penelitian

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan informan maupun catatan-catatan peneliti sewaktu melakukan penelitian, maka dapat diberikan suatu analisa tentang Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Penanganan Bencana Alam Di Kampung Lebo Kecamatan Manganitu. Adapun pembahasan hasil penelitian terbagi dalam aspek berikut ini :

1. Perencanaan

Melakukan pembuatan peta rawan bencana, pembuatan brosur, dan memasang tanda evakuasi (peringatan dini) adalah bagian dari proses perencanaan penanggulangan bencana alam di kabupaten kepulauan Sangihe, maka dalam hal ini peneliti

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

akan membahas proses perencanaan penanggulangan bencana. Tujuan pembuatan peta rawan bencana dikarenakan untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari bahaya bencana yang akan datang, dari hasil penelitian dengan masyarakat korban bencana memang BPBD sudah membuat peta rawan bencana dan mensosialisasikan kepada masyarakat namun yang menjadi persoalannya masyarakat berharap agar sosialisai lebih diperluas lagi atau mencari metode lain selain sosialisasi karena mengingat tidak semua masyarakat yang tahu dimana daerah yang rawan akan bencana.

Selain pembuatan peta rawan bencana, memasang tanda evakuasi dan pembuatan brosur atau poster tentang bencana juga sangat penting dikarenakan dapat membantu masyarakat dan bisa ditempatkan dimana saja. Dari hasil penelitian dengan kepala BPBD pemasangan tanda evakuasi (peringatan dini) sudah ada di sepanjang jalan tetapi sejauh ini BPBD belum membuat brosur atau poster tentang bencana, akhirnya masyarakat menilai BPBD lalai dalam merencanakan upaya pencegahan bencana. Dari hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori yang dikemukakan oleh Terry tentang fungsi manajemen pemerintah belum berjalan dengan baik. Seharusnya dalam konteks perencanaan penanggulangan bencana BPBD harus lebih efektif.

2. Pengorganisasian

Menentukan pihak-pihak yang berperan dan koordinasi dalam penanganan bencana alam adalah bagian dari proses pengorganisasian dalam penanganan bencana alam. Di kabupaten kepulauan

Sangihe Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pihak-pihak yang berperan dalam penanganan bencana alam. Peneliti akan membahas siapa saja yang melakukan koordinasi dalam penanganan bencana alam. Dalam program pengorganisasian penanganan bencana alam di kabupaten kepulauan Sangihe selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pembina dalam penanganan bencana alam pemerintah daerah juga berperan penting dalam penanganan bencana alam hal tersebut juga diatur pada UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 5 Pemerintah dan pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan penanggulangan bencana berdasarkan dengan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi dengan TNI / Kodim dan Polres dan dengan SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. BPBD berkoordinasi dengan dinas kesehatan dikarenakan dalam penanggulangan bencana dinas kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan dan para medis. Begitu juga dengan Dinas Sosial dapat membantu menyediakan kebutuhan pokok termasuk pangan, sandang dan kebutuhan dasar lainnya serta dapat membantu menampung bantuan-bantuan yang datang dari pihak lainnya.

3. Pelaksanaan

Mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan dan memberikan motivasi kepada siapa yang melaksanakan tugas supaya bisa

bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam di kabupaten kepulauan sangihe yaitu pembagian tugas dalam penanganan bencana.

Badan Penanggulangan bencana daerah merupakan lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dengan tujuan melindungi masyarakat dan aset-aset daerah terhadap resiko. Berdasarkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana, BPBD menyiapkan tim lapangan penanggulangan bencana alam, termasuk pembentukan organisasi atau gugus tugas bencana. Namun hasil penelitian dengan kepala BPBD bahwa sampai saat ini BPBD tidak membentuk organisasi atau gugus tugas bencana, dari hasil penelitian tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam penanggulangan bencana tidak ada pihak yang bertanggung jawab ketika akan turun kelapangan.

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan untuk bisa mengevaluasi kegiatan penanganan yang sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada pembahasan ini peneliti akan fokus pada pengawasan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana.

Relawan Penanggulangan Bencana termasuk Tim Sar yang ada di lapangan melaporkan hasil penanganan dan kaji cepat kepada posko bencana, BNPB, Bupati dan Sekda selanjutnya akan di evaluasi dan dilihat sejauh mana perkembangan penanggulangan bencana yang dilakukan. Dari hasil penelitian dengan masyarakat korban

bencana bahwa BPBD perlu membentuk gugus tugas bencana supaya saat kejadian di lapangan ada yang bertanggung jawab untuk fungsi pengawasan dengan sistim melapor kepada BPBD. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait dalam menyiapkan Tim Lapangan Penanggulangan Bencana Alam tidak efektif dan efisien. Sebagaimana teori Terry mengatakan fungsi pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Sedangkan jika dilihat dalam fungsi pelaksanaan seharusnya yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di lapangan yaitu Tim atau organisasi yang sudah di bentuk oleh BPBD, justru berbanding terbalik dengan hasil penelitian dengan kepala BPBD bahwa BPBD tidak membentuk Tim Penanganan Bencana. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mengevaluasi pelaksanaan dan harus di perbaiki agar tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan supaya.

Kesimpulan

1. Perencanaan, dalam melakukan pencegahan bencana BPBD sampai dengan saat ini tidak membuat brosur atau poster tentang bencana.
2. Pengorganisasian, Instansi BPBD sudah melakukan koordinasi

- dengan beberapa pihak dalam penanggulangan bencana yaitu, TNI / Kodim, Polres, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.
3. Pelaksanaan, dalam melaksanakan penanggulangan bencana di lapangan tidak ada pihak yang bertanggung jawab karena BPBD tidak membentuk Tim Lapangan Penanggulangan Bencana termasuk gugus tugas bencana.
 4. Pengawasan dari BPBD tidak efektif dan efisien karena meskipun relawan telah melaporkan hasil penanganan di lapangan yang paling penting adalah tanggung jawab BPBD untuk membentuk Tim Lapangan dan diberikan tugas untuk bertanggung jawab saat melakukan penanganan di lapangan.

Saran

1. Pada aspek perencanaan sebaiknya BPBD harus melakukan langkah-langkahantisipasi dini seperti membuat brosur dan poster bencana sehingga dapat mengurangi resiko bencana yang terjadi.
2. Pada aspek pengorganisasian terkait Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana jangan hanya merupakan statement tetapi Pemerintah Kabupaten Sangihe siap dan sigap melaksanakan Prosedur Tetap dengan baik bukan hanya sebagian-sebagian.
3. Pada aspek pelaksanaan sebaiknya BPBD melaksanakan pembentukan Tim Lapangan Bencana seperti gugus tugas bencana agar saat bencana datang masyarakat tahu siapa yang bertanggung jawab saat di lapangan tidak hanya mengandalkan relawan.
4. Pada aspek pengawasan lebih di tingkatkan lagi keefektifan dan keefisienan dalam mengevaluasi pelaksanaan sehingga dapat mengantisipasi langkah-langkah pencegahan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Surianingrat Bayu.1990.Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta
- Apter E David. 1987. Politik Mordenisasi. Jakarta: Gramedia
- Ulum M Chazienul. 2014. Manajemen Bencana. Malang: UB Press
- Rohmat. 2019. Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis: Duta Payaman,
- Simanjuntak. 2008. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Cv. Mandar Maju
- Terry. 1198. Principles of Management. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu, Hasibuan. 2007. Manajemen Dasar, Penelitian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Carter, William. 2008. Disaster Management: a disaster manager's handbook. Mandaluyong: Asian Development Bank.
- Djohanputro, Bramantio. 2006. PMM Manajemen: One Stop Management in Indonesia: Manajemen Disaster Reviuw. Juni, 2014.
- Kiswanto. 2015. Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Februari, 2015.

Romy Bogar, Ronny Gosal, Gustaf Undap, 2019 . Manajemen Pemerintahan Dalam Pengolahan Sampah Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Eksekutif 3 (3). Scholar. Google. Co. id.

Sumber-Sumber Lainnya :

- . UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- . PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- . Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- . Peraturan Bupati Kabupaten Sangihe Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

